

Research Article

Harmonisasi Sosial Melalui Pendekatan Religi: Respons Kemanusiaan Bagi Masyarakat Terdampak Letusan Gunung Semeru

Social Harmonization Through Religious Approach: Humanitarian Response for The Community Affected by The Eruption of Mount Semeru

Wilopo, Abdullah Said, Benny Hutahayan, Inggang Perwangsa Nuralam*, Rizal Alfisyahr

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, 65145 Indonesia

*Corresponding Author:

ing.nuralam@ub.ac.id

Submission August 2023, Revised September 2023, Accepted November 2023

ABSTRAK

Indonesia, yang dikenal dengan kekayaan geologisnya, kerap mengalami bencana alam. Salah satunya, letusan Gunung Semeru pada Desember 2021 di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut menghadirkan tantangan pemulihan yang kompleks. Menurut laporan BNPB, kerusakan infrastruktur mencapai miliaran rupiah dan ribuan warga terdislokasi. Tantangan ini bukan hanya pada pemulihan infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan psikologis warga yang mengalami trauma. Gangguan pada perekonomian lokal, pemisahan keluarga, dan kerugian lainnya memperberat beban psikososial yang harus dihadapi. Masyarakat terdampak letusan Gunung Semeru menghadapi tantangan beragam, khususnya dalam aspek keagamaan dan kebutuhan Rukun Kematian. Studi ini menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan Rukun Kematian di setiap fasilitas sosial (Fasos) sebagai fondasi utama pemulihan pasca-bencana. Melalui kerja sama dengan BNPB, Program Pendampingan Sosial telah berhasil mengalokasikan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Survei terhadap masing-masing Fasos mengungkap kebutuhan spesifik mereka, mulai dari perlengkapan pemulasaran jenazah hingga pengeras suara. Pendampingan teknis terkait Rukun Kematian pun dilaksanakan dengan menghadirkan praktisi yang kompeten. Meskipun telah menunjukkan dampak positif, penelitian ini menekankan keberlanjutan pendampingan sebagai kunci utama pemulihan jangka panjang masyarakat terdampak. Sebagai rekomendasi, pendampingan ini harus diteruskan dengan mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang berubah, agar masyarakat terus mendapat dukungan yang optimal dalam menghadapi tantangan pasca-bencana.

Kata Kunci: Pendampingan Sosial, Rukun Kematian, Bencana

ABSTRACT

Indonesia, known for its geological richness, often experiences natural disasters. One such event was the eruption of Mount Semeru in December 2021 in Lumajang Regency, East Java. The incident posed complex recovery challenges. According to the National Disaster Management Agency (BNPB) report,

How to cite:

Wilopo, Said, A, Hutahayan, B, Nuralam, I. P & Alfisyahr, R. (2023). Harmonisasi Sosial Melalui Pendekatan Religi: Respons Kemanusiaan Bagi Masyarakat Terdampak Letusan Gunung Semeru. *Berdikari: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 6 (1): 1 – 15. doi:10.11594/bjpmi.06.01.1

infrastructure damage reached billions of rupiahs, and thousands of residents were displaced. The challenges extended beyond infrastructure recovery, encompassing the psychological recovery of traumatized residents. Disruptions to the local economy, family separations, and other losses exacerbated the psychosocial burden faced by the affected population. The communities impacted by the eruption of Mount Semeru faced diverse challenges, particularly in religious aspects and the fulfillment of funeral rites (Rukun Kematian). This study highlights the importance of meeting funeral rites needs at every Social Facility (Fasilitas Sosial or Fasos) as a primary foundation for post-disaster recovery. Through collaboration with BNPB, the Social Assistance Program has successfully allocated resources for meeting these needs. Surveys of each Fasos revealed their specific requirements, ranging from funeral equipment to loudspeakers. Technical assistance related to funeral rites was provided by competent practitioners. Although it has shown positive impacts, this research emphasizes the sustainability of assistance as a key factor in the long-term recovery of the affected community. As a recommendation, this assistance should continue, considering the dynamics and changing needs of the community, to ensure ongoing optimal support in facing post-disaster challenges.

Keywords: Social Assistance, Funeral Rites, Disaster

Pendahuluan

Posisi geografis Indonesia di Cincin Api Pasifik membuatnya rentan terhadap bencana alam, termasuk letusan gunung berapi (Purba et al., 2022). Menurut data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Indonesia memiliki sekitar 127 gunung berapi aktif, dan beberapa di antaranya termasuk yang paling aktif di dunia (Magma Indonesia, 2021). Salah satunya, letusan Gunung Semeru pada Desember 2021 dan 2022 di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, telah menghadirkan tantangan pemulihan yang kompleks. Berdasarkan data BNPB (2021) masyarakat yang terdampak erupsi semeru yang berasal dari Desa Sumberwuluh dan Supiturang, berdasarkan data dari dokumen (R3P) Erupsi Gunung Semeru kerusakan yang terjadi sebesar 1107 unit rusak berat, 95 unit rusak sedang, dan 657 unit rusak ringan. Bencana yang terjadi mengakibatkan warga harus direlokasi pada Hunian Sementara dan Hunian Tetap yang disediakan oleh pemerintah di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candi Puro Kabupaten Lumajang. Adapun dalam Hunian Tetap dan Hunian sementara dibentuk fasos (fasilitas sosial) yang dibagi menjadi 5 fasos.

Sementara itu, menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),

kerusakan infrastruktur mencapai miliaran rupiah dan ribuan warga terdislokasi (BNPB, 2021). Tantangan tersebut bukan hanya sebatas pemulihan infrastruktur, tetapi juga pemulihan psikologis warga yang mengalami trauma. Kondisi perekonomian lokal pun terganggu, dengan banyak sektor usaha yang terhenti dan sumber mata pencaharian warga yang hilang (Purba et al., 2022). Kehilangan tempat tinggal, serta pemisahan keluarga akibat evakuasi, menambah beban psikososial masyarakat yang harus dihadapi dalam proses pemulihan (Hafni & Lubis, 2016).

Pendampingan merupakan salah satu metode efektif untuk meredakan dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat pasca bencana (Sulistiyowati et al., 2022). Sebagai respons terhadap situasi pasca bencana, pendampingan sosial menjadi titik sentral dalam upaya pemulihan yang holistic (Bahransyaf, 2009; Zuhrah et al., 2016). Dalam kerangka Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang penanggulangan bencana, pemulihan sosial dianggap mencakup beragam aspek (Gerungan, 2019; Zagarino et al., 2021). Mulai dari pemulihan psikologis, rekonstruksi tatanan sosial-budaya, revitalisasi kearifan lokal dan tradisi, hingga pemulihan dinamika sosial budaya masyarakat. Merupakan hal yang penting untuk memahami bahwa dampak dari bencana besar, seperti erupsi Gunung

Semeru, melampaui kerugian material dan ekonomi (Okfitasari et al., 2023). Dampaknya dapat merembet pada struktur sosial dan psikologis masyarakat (Khan et al., 2008). Sehingga, melalui pendampingan sosial, masyarakat diharapkan dapat kembali ke kondisi kehidupan sosial-budaya yang setidaknya setara, atau idealnya, lebih baik dari sebelum bencana melanda.

Menurut Amrullah et al. (2022) adanya bencana alam seringkali memberikan dampak mendalam terhadap dimensi sosial komunitas, khususnya dalam konteks keagamaan. Infrastruktur keagamaan, seperti masjid, gereja, atau pura, yang menjadi pusat kegiatan dan interaksi komunitas, sering kali hancur atau rusak parah akibat bencana. Menurut penelitian oleh Ekawati (2018), bencana alam di Indonesia telah mengakibatkan kerusakan signifikan pada fasilitas keagamaan di beberapa wilayah, mengganggu aktivitas keagamaan harian komunitas. Kehilangan infrastruktur ini bukan hanya menandai hilangnya tempat ibadah fisik, tetapi juga mengganggu ritme kehidupan keagamaan komunitas, seperti pertemuan mingguan, kajian, atau ritual keagamaan lainnya (Sheikhi et al., 2021).

Selain itu, kerusakan fisik juga menyebabkan fragmentasi komunitas keagamaan, karena banyak anggota komunitas yang terpaksa mengungsi atau merantau mencari kehidupan baru. Sebuah studi oleh Sheikhi et al. (2021) menekankan bahwa fragmentasi ini seringkali memutuskan ikatan sosial dan spiritual, mempengaruhi identitas dan koherensi komunitas. Hal ini mengakibatkan terputusnya ikatan sosial keagamaan yang telah terbina lama dan menghadirkan tantangan baru dalam mempertahankan nilai, tradisi, dan tata cara keagamaan di tengah ketidakpastian (Shannonhouse et al., 2019). Oleh karena itu, pemulihan pasca bencana tidak hanya melibatkan rekonstruksi fisik tetapi juga pemulihan tatanan sosial keagamaan, untuk memastikan kelangsungan spiritualitas dan kohesi komunitas (Thouret et al., 2022).

Salah satu tradisi yang terdampak adalah tradisi keagamaan, rukun kematian berfungsi

sebagai panduan dalam menghadapi kematian dan berkabung. Ritus ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk merenungkan makna kehidupan, mendukung satu sama lain, dan menemukan ketabahan di tengah kesulitan (Ahmad, 2015). Rukun kematian merujuk pada serangkaian tata cara dan doa yang diadakan dalam proses pemakaman dalam tradisi Islam (Darlan, 2023). Terdiri dari beberapa tahapan, seperti memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah dengan cara yang sesuai syariat. Dalam konteks ini, rukun kematian tidak hanya berfungsi sebagai prosedur ritual, tetapi juga sebagai sarana psikologis yang mendalam bagi masyarakat untuk menghadapi kematian. Sebuah penelitian oleh (Darlan, 2023) menunjukkan bahwa penerapan rukun kematian yang benar dan sesuai dengan tuntunan agama mampu memberikan rasa tenang kepada keluarga yang ditinggalkan, dan membantu mereka dalam proses berduka. Selain itu, ritual-ritual dalam rukun kematian juga memiliki dimensi sosial yang kuat, di mana masyarakat sekitar terlibat aktif dalam proses pemakaman, menciptakan rasa solidaritas dan dukungan bagi keluarga yang berduka (Lubis, 2019).

Dalam konteks bencana, kondisi fisik dan psikologis masyarakat seringkali terganggu, sehingga menjalankan rukun kematian sesuai dengan tradisi menjadi sulit (Septiawantari & Mustikasari, 2021). Misalnya, kekurangan air atau fasilitas memandikan jenazah, ketidaktersediaan kain kafan yang sesuai, atau kerusakan masjid dan fasilitas keagamaan lain yang biasanya menjadi tempat berkumpulnya komunitas. Infrastruktur yang rusak akibat bencana, seperti masjid atau tempat pemakaman, dapat menghambat pelaksanaan rukun kematian, mempersulit proses pemakaman, dan bahkan menghalangi komunitas untuk bersama-sama mendukung keluarga yang berduka. Penelitian oleh Lubis (2019) menyoroti bagaimana beberapa komunitas di daerah bencana mengalami kesulitan dalam memahami dan melaksanakan rukun kematian, terutama

dikarenakan hilangnya tokoh agama atau pemuka masyarakat yang biasanya memimpin proses ini, serta kerusakan infrastruktur keagamaan yang mendalam. Oleh karena itu, pemahaman mendalam dan pendampingan terhadap masyarakat pasca bencana dalam konteks rukun kematian dan pemulihan infrastruktur keagamaan menjadi penting untuk memastikan bahwa proses berduka dapat berjalan dengan lancar dan penuh makna bagi yang ditinggalkan.

Pendampingan sosial menjadi inti dari upaya pemulihan. Pendampingan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam menjadi krusial, terutama dalam aspek sosial keagamaan seperti rukun kematian. Bencana tidak hanya menghancurkan infrastruktur fisik, tetapi juga mengganggu tatanan sosial dan spiritual yang telah terbangun lama (Widigdo, 2021). Di tengah kehilangan dan kesulitan, rukun kematian memberikan petunjuk, kenyamanan, dan harapan bagi mereka yang berduka. Tanpa pendampingan yang tepat, masyarakat mungkin kesulitan menjalankan tata cara pemakaman sesuai dengan keyakinan mereka, yang dapat menambah beban trauma pasca bencana (Ekawati, 2018). Dengan mendukung dan memfasilitasi pemahaman serta pelaksanaan rukun kematian, kita membantu masyarakat dalam menjalani proses berduka dengan cara yang bermakna, mempertahankan identitas spiritual mereka, dan memperkuat ikatan komunitas dalam menghadapi tantangan pemulihan pasca bencana. Oleh karena itu, pendampingan yang holistik, yang mempertimbangkan aspek sosial keagamaan, menjadi salah satu kunci utama dalam proses rehabilitasi dan pemulihan masyarakat pasca bencana.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan metode Penelitian Tindakan Partisipatif (Participatory Action Research atau PAR). PAR adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengintegrasikan proses penelitian dengan upaya perubahan sosial. Perubahan sosial yang dikejar adalah bagaimana melalui

upaya pemberdayaan, kita dapat mencapai tiga indikator penting, yaitu terbentuknya komitmen bersama dengan masyarakat, kemunculan pemimpin lokal di dalam komunitas, dan pendirian institusi baru yang memenuhi kebutuhan komunitas. Kata "PAR" sendiri mencakup tiga unsur utama yang saling terkait, yaitu partisipasi, penelitian, dan tindakan. Pentingnya tindakan yang didasarkan pada penelitian partisipatif adalah untuk memastikan bahwa tindakan tersebut relevan dengan masalah yang dihadapi. Sebaliknya, tindakan yang tidak berdasar pada riset partisipatif yang tepat dapat menjadi tidak efektif. Namun, proses ini tidak berhenti pada tindakan saja; setelah itu, evaluasi dan refleksi dilakukan, yang kemudian menjadi bahan untuk riset mengenai kondisi subjek penelitian setelah tindakan tersebut dilakukan. Proses ini berulang dan berkelanjutan hingga mencapai hasil yang diharapkan. Kemmis dan Wilkinson (2002) menggambarkan proses penelitian aksi ini dalam model siklus seperti spiral. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Dengan demikian, pendekatan PAR menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penelitian dan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Selanjutnya, pada bagian ini juga diuraikan hal-hal esensial yang terkait dengan implementasi pendampingan sosial bagi masyarakat terdampak letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Hal tersebut meliputi strategi pendampingan sosial, teknik pendampingan yang efektif, serta model pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat setempat. Pendampingan sosial ini merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah melalui BNPB dan Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama dengan akademisi, khususnya dosen dan mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Sinergi ini menjadi bentuk tanggung jawab sosial yang diwujudkan dalam upaya pemulihan masyarakat yang terkena dampak.

Pengabdian ini berfokus pada masyarakat terdampak letusan Gunung Semeru yang

berada di Kabupaten Lumajang, khususnya mereka yang menempati Hunian Tetap. Proses pendampingan dilakukan selama 6 bulan awal pada tahun 2023, dengan mengedepankan pendekatan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini penting agar hasil dari pendampingan bisa optimal dan masyarakat dapat segera pulih dari dampak bencana tersebut. Sebelum memulai program pendampingan, tim dari Universitas Brawijaya (UB) telah melakukan survei mendalam untuk mengetahui kebutuhan sebenarnya dari masyarakat yang terdampak. Dari hasil survei tersebut, ditemukan bahwa kebutuhan masyarakat bukan hanya bersifat materi, tetapi juga mendalam pada aspek psikososial, khususnya dalam konteks agama atau religi. Salah satu kebutuhan yang sangat menonjol adalah pendampingan terkait rukun kematian. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan holistik dalam proses rehabilitasi, di mana aspek religi dan spiritual menjadi salah satu fokus utama.

Menurut Afandi et al. (2016), dalam metode PAR aktivitas pengabdian perlu untuk difokuskan sehingga dapat meningkatkan dampak positif adanya pengabdian. Menurut Soehada (2016) pengabdian dalam hal keagamaan merupakan salah satu aspek pending yang dapat berupa edukasi, bantuan infrastruktur dan pendampingan keagamaan. Adapun pendampingan sosial yang dilakukan terbagi menjadi 3 jenis pendampingan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pertama, pendampingan terkait pendidikan dan pelatihan rukun kematian. Edukasi mengenai Rukun Kematian sangat krusial di tengah masyarakat pasca bencana. Seringkali, di tengah keterbatasan dan krisis, masyarakat mungkin lupa atau tidak mengetahui tata cara pemakaman yang sesuai syariat. Oleh karena itu, pelatihan ini bertujuan untuk mengingatkan, mengedukasi, dan memastikan bahwa prosesi pemakaman dapat berjalan dengan baik meskipun dalam situasi yang tidak kondusif. Kedua, yaitu rehabilitasi alat rukun kematian, mengingat pentingnya menjalankan Rukun Kematian

dengan benar maka kebutuhan alat seperti keranda, genset untuk penerangan, dan tenda menjadi sangat vital, terutama di lokasi yang infrastrukturnya rusak parah akibat letusan. Oleh karena itu, pendampingan dalam bentuk penyediaan alat-alat tersebut sangat membantu masyarakat dalam menjalankan prosesi pemakaman. Ketiga, adalah memfasilitasi dialog antar komunitas di fasos hunian tetap. Dialog antar komunitas, khususnya di fasos hunian tetap masyarakat terdampak, sangat penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi setiap komunitas. Melalui dialog ini, masing-masing komunitas dapat menyampaikan kebutuhan, harapan, dan aspirasinya, khususnya terkait dengan Rukun Kematian dan dukungan psikososial yang diperlukan.

Selanjutnya, dalam upaya pendampingan, terdapat empat pendekatan yang diadopsi dari pendekatan PAR yaitu penentuan masalah atau kebutuhan, dialog dengan komunitas terkait, strategi tindakan dan tindakan terpadu. Menurut Afandi et al. (2016) metode PAR dapat dimodifikasi dengan tetap memperhatikan siklus PAR yaitu Observasi, Refleksi, Rencana Aksi Strategis dan Tindakan. **a) Pertama adalah penentuan kebutuhan tertentu.** Menggunakan pendekatan kualitatif memungkinkan tim untuk menyelidiki dan memahami kebutuhan yang sangat spesifik dari setiap sub-sektor dan fasilitas sosial (Fasos). Penelitian mendalam ini menyoroti aspek-aspek yang mungkin terlewatkan jika hanya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan *Sustainability of Social Livelihood* (SSL) untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Dengan menentukan kebutuhan khusus ini, alokasi sumber daya dapat lebih terfokus, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini juga memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara tim pendampingan dan masyarakat setempat. **b) Dialog dengan komunitas.** Mekanisme dialog memberikan platform bagi anggota komunitas untuk berbicara, berbagi,

dan berpartisipasi aktif dalam menentukan arah dan bentuk intervensi. Proses ini mempromosikan demokrasi partisipatif dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dihargai. Dengan mengedepankan dialog sebagai metode, keputusan yang diambil lebih reflektif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ini juga mendorong rasa memiliki, yang merupakan kunci untuk keberhasilan jangka panjang dari setiap program pendampingan. **c) strategi tindakan mendetail.** Strategi yang detail dan terencana adalah fondasi dari setiap intervensi yang berhasil. Dengan memiliki rencana aksi yang jelas, semua pihak yang terlibat dapat memiliki panduan kerja yang dapat memastikan langkah-langkah dijalankan dengan sistematis. Dalam strategi ini, pembentukan kelompok kerja, pendampingan, penetapan insentif, hingga pemantauan, semuanya diatur dengan teliti.

Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja tetapi juga memastikan bahwa setiap tantangan yang muncul dapat diatasi dengan cepat. **d) Tindakan terpadu,** dimana solusi terbaik untuk pemulihan sosial adalah pendekatan yang terintegrasi. Dengan mengkombinasikan berbagai intervensi, mulai dari aspek ritual keagamaan hingga pengembangan budaya, pendekatan ini memastikan bahwa semua kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pendekatan yang menyeluruh ini tidak hanya memberikan bantuan praktis tetapi juga mendorong pemulihan emosional dan psikologis masyarakat. Hal ini sangat penting dalam konteks trauma yang mungkin dialami oleh masyarakat pasca bencana.

Adapun, Kegiatan Pendampingan yang dilakukan berdasarkan 4 pendekatan diatas dirangkum pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1. Ringkasan Kegiatan Pendampingan

No	Kegiatan	Keterangan
1	Penetapan Masalah	Penetapan masalah berdasarkan kebutuhan masyarakat terdampak bencana Gunung Semeru.
2	Pendampingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pelaksana memberikan masukan & saran untuk kemajuan kelompok pendamping 2. Tim pelaksana memberikan fasilitasi kelompok untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait 3. Tim pelaksana memberikan bantuan advokasi dan membangun kemitraan
3	Penetapan Stimulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan daftar bantuan berdasarkan hasil kajian 2. Pemberian Bantuan Stimulan (Bantuan yang diberikan berupa barang dan bukan uang serta diberikan kepada kelompok bukan individu yang tertuang dalam berita acara)
4	Bimbingan Teknis	Tim Pelaksana memberikan pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis terhadap stimulan yang diberikan dengan mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya
5	Monitoring	Tim Pelaksana memberikan pendampingan kepada kelompok dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penetapan Masalah

Dalam setiap upaya pengabdian masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dampak erupsi Gunung Semeru terhadap masyarakat sekitar, tahap penetapan masalah menjadi salah satu langkah awal yang esensial dan menentukan arah pendampingan selanjutnya. Untuk pendampingan sosial ini, dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu diskusi dan penyebaran kuesioner. Pertama, dilakukan diskusi dengan BPBD Kabupaten Lumajang. Dalam rangka mengembangkan strategi pendampingan sosial yang efektif, koordinasi dan diskusi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi langkah krusial. BPBD, sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana, memiliki wawasan mendalam mengenai kondisi, dinamika, serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terdampak bencana, khususnya pasca-letusan Gunung Semeru.

Diskusi dengan BPBD dimulai dengan pemahaman umum mengenai dampak bencana, data korban, serta area-area yang paling parah terkena dampak. Selain itu, BPBD juga menyampaikan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan sejauh ini, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, tim pendamping bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi di lapangan dan mengidentifikasi celah atau kebutuhan pendampingan yang belum terpenuhi. Selain itu, diskusi ini juga menjadi forum bagi tim pendamping untuk menyampaikan rencana, pendekatan, serta metode pendampingan yang akan dilakukan. Hal ini memungkinkan adanya sinergi antara BPBD dan tim pendamping, sehingga upaya pendampingan yang dilakukan bisa lebih terkoordinasi dan terintegrasi dengan program penanggulangan bencana yang telah ada.



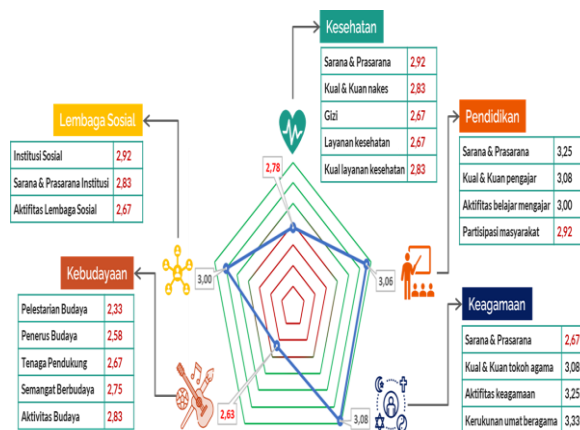
Gambar 1. Dokumentasi Koordinasi dan Kajian Kebutuhan dengan BPBD Kabupaten Lumajang

Berdasarkan hasil koordinasi dan kajian kebutuhan dengan BPBD Kabupaten Lumajang diketahui bahwa bantuan yang selama ini diterima oleh masyarakat mayoritas adalah dalam bentuk ekonomi. BPBD Kabupaten Lumajang juga menekankan pentingnya diadakannya pendampingan masyarakat dalam hal sosial. Selanjutnya, dilakukan pula diskusi dengan masyarakat setempat atau tokoh masyarakat yang menempati Hunian Tetap Korban Letusan Gunung Semeru. Diskusi ini bertujuan untuk memahami secara langsung permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pasca bencana. Melalui dialog terbuka dan komunikasi dua arah, masyarakat diberi ruang untuk menyuarakan kekhawatiran, kesulitan, dan harapannya. Hasil diskusi menunjukkan bahwa masyarakat setempat memerlukan pendampingan dalam aspek sosial.



Gambar 2. Dokumentasi Koordinasi dan Kajian Kebutuhan Dengan Kepala Desa Sumbermujur

Dalam menentukan pendampingan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat, peneliti melakukan penyebaran kuesioner dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih terstruktur dan kuantitatif. Kuesioner dirancang dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk mengetahui sejauh mana dampak erupsi bagi kehidupan masyarakat, baik dari aspek fisik, ekonomi, sosial, maupun psikologis. Hasil dari kuesioner ini kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi masyarakat pasca bencana, serta menjadi dasar dalam menentukan prioritas dan arah pendampingan sosial selanjutnya. Berdasarkan hasil riset secara kuantitatif menggunakan analisis *Sustainability of Social Livelihood Framework*. *Sustainability of Social Livelihood* (SSL) didapatkan hasil berikut:



Gambar 3. Hasil Kuesioner *Sustainability of Social Livelihood*

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa nilai tertinggi didapatkan dari aspek agama yaitu sebesar 3,08, namun di dalam aspek keagamaan masih terdapat indikator yaitu sarana dan prasarana keagamaan yang masih mendapatkan nilai rendah. Sedangkan apabila dilihat dari total keseluruhan kebudayaan dan Kesehatan menjadi aspek yang mendapatkan nilai masih dibawah 3 (kategori baik). Setelah mendapatkan hasil data melalui data kuantitatif, tim melakukan pendalaman melalui pendekatan kualitatif melalui diskusi dengan Masyarakat dan stakeholders terkait. Dari pendalaman tersebut didapatkan pemetaan masalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kendala dan Permasalahan

Sub sektor	Kendala dan Permasalahan	Validasi
Keagamaan	Pemenuhan kebutuhan Rukun Ke-matian untuk tiap Fasos	Belum mendapat intervensi & pen-dampingan
	Perlengkapan mushola & ngaji (pengeras suara, meja untuk mengaji)	Belum mendapat intervensi & pen-dampingan
	keseragaman sarana & prasarana	Belum mendapat intervensi & pen-dampingan
Lembaga So-sial	Perlengkapan olah raga (bola voli)	Belum mendapat intervensi & pen-dampingan

	Seragam satgas pengamanan	Belum mendapat intervensi & pendampingan
Kebudayaan	Pengelolaan Kesenian Wayang	Belum mendapat intervensi & pendampingan
	Pengelolaan Kesenian Hadroh	Belum mendapat intervensi & pendampingan
Pendidikan	Ketersediaan Air & Listrik di Sekolah	Sudah dianggarkan oleh Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Lumajang
	Aktivitas belajar-mengajar belum berjalan di beberapa sekolah	
Kesehatan	Meja tiap fasos untuk kegiatan Posyandu	Sudah disediakan oleh Puskesmas Penanggal
	Mobil Ambulance	

Pendampingan

Dalam proses pendampingan sosial pasca-bencana, terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana. Tahapan-tahapan ini dirancang untuk memberikan dukungan maksimal kepada kelompok pendamping sehingga dapat meningkatkan kualitas pendampingan yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Berikut pembahasannya:

Pemberian Masukan & Saran

Di tahap ini, Tim Pelaksana berfokus pada pengidentifikasian serta evaluasi terhadap metode dan strategi yang digunakan oleh kelompok pendamping. Berdasarkan observasi serta evaluasi tersebut, tim memberikan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan serta peningkatan kualitas pendampingan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendampingan yang diberikan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan efektif dalam membantu mereka mengatasi dampak psikososial pasca-bencana. Masukan yang diterikan dari masyarakat adalah, dalam aspek sosial, masyarakat masih kesulitan da-

lam mendapatkan akses mengenai keagamaan. Misalnya, hilangnya beberapa acara rutin keagamaan dan kurangnya infrastruktur dan pengetahuan mengenai rukun kematian. Pada akhir diskusi dapat disimpulkan bahwa masyarakat memerlukan pendampingan lebih lanjut terkait proses rukun kematian.



Gambar 4. Diskusi Informal Tim Universitas Brawijaya ke Hunian Tetap Fasilitasi Koordinasi dengan Stakeholder

Memahami bahwa pemulihan pasca-bencana memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, Tim Pelaksana berperan aktif dalam memfasilitasi kelompok pendamping untuk berkoordinasi dengan stakeholder

terkait. Mulai dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, hingga organisasi-organisasi lain yang memiliki misi serupa. Melalui koordinasi yang terjalin, potensi duplikasi kerja dapat diminimalkan, sumber daya dapat dialokasikan dengan lebih efisien, dan solusi yang lebih komprehensif bisa diberikan kepada masyarakat terdampak. Hasil koordinasi menyatakan bahwa ada beberapa kebutuhan yang mendesak dan belum terpenuhi, khususnya di bidang keagamaan. Misalnya, kebutuhan perlengkapan untuk pemulasaran jenazah yang masih kurang di beberapa Fasos. Selain itu, teridentifikasi juga kebutuhan untuk perlengkapan lain seperti pengeras suara yang digunakan dalam kegiatan keagamaan di hampir semua Fasos. Hal ini menunjukkan pentingnya peran agama dalam proses pemulihan psikososial masyarakat pasca-bencana.

Sebagai tanggapan, beberapa lembaga swadaya masyarakat dan organisasi telah menawarkan bantuan dalam bentuk donasi perlengkapan keagamaan. Sedangkan pemerintah pusat (BNPB) berkomitmen untuk mendukung logistik dan infrastruktur yang diperlukan. Selain itu, berdasarkan hasil koordinasi, diakui pentingnya mengadakan sesi pendampingan khusus mengenai rukun kematian

dengan mengundang praktisi yang kompeten di bidangnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang benar dan mendalam tentang tata cara pemakaman sesuai dengan syariat, meski dalam kondisi keterbatasan.



Gambar 5. Koordinasi, Sosialisasi, dan Kajian Kebutuhan dengan *Stakeholders*

Penetapan Stimulan

Berdasarkan pendalaman yang dilakukan aspek Keagamaan, Lembaga Sosial, dan Kebudayaan merupakan aspek yang belum terintervensi. Dari ketiga aspek tersebut dilakukan skala prioritas yang disepakati bersama Masyarakat hunian tetap, dan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Kendala, Permasalahan, dan Skala Prioritas

Sub Sektor	Kendala & Permasalahan	Skala prioritas berdasarkan hasil musyawarah warga (validasi kebutuhan)	Bentuk Intervensi
Keagamaan	Pemenuhan kebutuhan Rukun Kematian untuk tiap Fasos	Penting	Pengadaan dengan Program Pendampingan Sosial
	Perlengkapan mushola & ngaji (pengeras suara, meja untuk mengaji)	Penting	Pengadaan dengan Program Pendampingan Sosial

	Keseragaman sarana & prasarana	Kurang Penting	Pengadaan dengan Program Pendampingan Sosial
Lembaga	Perlengkapan olahraga (bola voli)	Penting	Pengadaan dengan Program Pendampingan Sosial
	Seragam satgas pengamanan	Penting	Pengadaan dengan berkoordinasi dengan warga yang berprofesi sebagai penjahit
Kebudayaan	Pengelolaan Kesenian Wayang	Kurang Penting	Pengadaan dengan Program Pendampingan Sosial
	Pengelolaan Kesenian Hadroh	Kurang Penting	Pengadaan dengan Program Pendampingan Sosial

Dari hasil pemetaan diatas, dilakukan diskusi dengan Masyarakat untuk mendapatkan aspek utama yang akan diintervensi, dan didapatkan hasil yaitu Pemenuhan kebutuhan Rukun Kematian untuk setiap Fasilitas Sosial. Kebutuhan Rukun Kematian terdiri dari *sound*

system portable, perlengkapan memandikan jenazah, keranda, penutup keranda, tenda atau terop, dan genset. Setiap fasilitas sosial memiliki kebutuhan kelengkapan rukun kematian berbeda-beda, berikut rincian kebutuhan setiap fasilitas sosial:

Tabel 4. Kebutuhan Setiap Fasos

Fasos	Kebutuhan
Fasos 1	perlengkapan pemulasaran jenazah belum ada sama sekali: penguat suara
Fasos 2	perlengkapan kurang terop, penguat suara
Fasos 3	perlengkapan kurang tikar, penguat suara
Fasos 4	perlengkapan pemulasaran jenazah belum ada sama sekali; penguat suara
Fasos 5	perlengkapan pemulasaran jenazah belum ada sama sekali: penguat suara
Semua Fasos	Genset

Bimbingan Teknis

Dalam pendekatan rehabilitasi psikososial bagi masyarakat terdampak bencana,

pemahaman mengenai rukun kematian menjadi salah satu aspek penting. Terutama di tengah situasi bencana, pemahaman dan implementasi rukun kematian dengan tepat menjadi

vital. Oleh karena itu, bimbingan teknis terkait rukun kematian diselenggarakan sebagai bagian dari pendampingan sosial. Dalam fase ini, Tim Pelaksana berperan aktif memberikan bimbingan teknis kepada kelompok pendamping mengenai berbagai hal terkait rukun kematian. Mengingat kompleksitas dan sensitivitas topik ini, diperlukan pendekatan yang detail dan hati-hati. Oleh karena itu, tim memastikan bahwa materi bimbingan teknis disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, namun tetap mendalam dan sesuai dengan prinsip syariah.



Gambar 6. Bimbingan Teknis terkait Rukun Kematian

Tim Pelaksana mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya yaitu dari Dinas Keagamaan Kabupaten Lumajang. Narasumber ini bukan hanya mereka yang memiliki keahlian dalam hukum Islam dan tata cara pemakaman, tetapi juga mereka yang memiliki pengalaman praktis dalam memberikan pendampingan terkait rukun kematian di tengah situasi bencana. Dengan begitu, materi yang disampaikan tidak hanya teoritis, namun juga aplikatif dan relevan dengan kondisi di lapangan. Selain itu, bimbingan teknis ini juga diharapkan dapat menjadi ruang bagi kelompok pendamping untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, dan menyelesaikan berbagai tantangan yang mungkin mereka hadapi di lapangan. Melalui sesi tanya jawab dan diskusi interaktif, kelompok pendamping diberi kesempatan untuk memperdalam pemahaman mereka dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keseluruhan

proses bimbingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas kelompok pendamping dalam memberikan dukungan yang tepat kepada masyarakat terdampak, khususnya dalam konteks rukun kematian.

Monitoring

Proses monitoring merupakan langkah krusial dalam setiap program pendampingan sosial. Ini memastikan bahwa semua kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Tahap ini juga memberikan kesempatan bagi tim pelaksana untuk melakukan koreksi dan perbaikan, jika ditemukan hambatan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, tim aktif memberikan pendampingan kepada kelompok dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang. Pendampingan ini diwujudkan dalam bentuk kunjungan lapangan, diskusi rutin, dan evaluasi berkala.



Gambar 7. Observasi dan Monitoring

Melalui kunjungan lapangan, tim pelaksana mendapati hasil positif dari pelaksanaan kegiatan di lapangan. Evidensi menunjukkan bahwa program pendampingan berjalan dengan baik dan telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat terdampak. Interaksi langsung dengan masyarakat memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana kegiatan telah membantu mereka menghadapi tantangan pasca-bencana. Diskusi rutin dengan kelompok pendamping mengkonfirmasi keberhasilan pendampingan, dengan banyak feedback positif dan

pengakuan akan manfaat yang telah dirasakan. Kesuksesan ini menjadi bukti keefektifan pendekatan yang diambil oleh tim dalam memberikan pendampingan sosial kepada masyarakat terdampak bencana.

Pembahasan

Tahapan metode Participatory Action Research (PAR) yang telah dimodifikasi memiliki implikasi yang signifikan dalam pendampingan masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Semeru. Pertama, tahap Observasi atau penentuan masalah merupakan langkah awal dalam pemahaman kondisi masyarakat pasca-bencana. Tim penelitian berfokus pada pengumpulan data dan informasi yang akurat mengenai dampak yang dialami oleh masyarakat, dengan berkomunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dan melalui diskusi dengan masyarakat setempat. Hasil diskusi dengan masyarakat menunjukkan bahwa fokus pendampingan adalah pada konteks keagamaan khususnya rukun kematian.

Kemudian, tahap Refleksi yang merupakan aktivitas dialog mendapat hasil beberapa masukan yang diterima dari masyarakat mencakup kesulitan dalam akses terhadap keagamaan, seperti hilangnya acara rutin keagamaan dan kurangnya infrastruktur dan pengetahuan mengenai rukun kematian. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan pendampingan lebih lanjut terkait proses rukun kematian. Tim Pelaksana juga berperan dalam memfasilitasi kelompok pendamping untuk berkoordinasi dengan berbagai stakeholder terkait, seperti pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Koordinasi ini bertujuan untuk meminimalkan duplikasi kerja, alokasi sumber daya yang lebih efisien, dan memberikan solusi yang lebih komprehensif kepada masyarakat terdampak.

Selanjutnya, tahap Rencana Aksi Strategis melibatkan kolaborasi antara tim penelitian dan BPBD untuk merancang solusi konkret. Dalam tahap ini, mereka merumuskan rencana aksi strategis yang mencakup

langkah-langkah yang harus diambil untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak. Hal ini memastikan bahwa pendampingan yang diberikan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan rukun kematian adalah prioritas utama, dengan kebutuhan berbeda-beda untuk setiap fasilitas sosial. Ini mencakup pengadaan perlengkapan seperti pengeras suara, meja untuk mengaji, tenda pemulasaran jenazah, dan genset.

Terakhir, tahap Tindakan melibatkan pelaksanaan rencana aksi strategis yang telah dirumuskan. Tim penelitian dan BPBD bekerja bersama-sama untuk memberikan dukungan dan pendampingan sosial kepada masyarakat terdampak. Narasumber yang kompeten di bidangnya, baik dari aspek hukum Islam maupun pengalaman praktis dalam situasi bencana, diundang untuk memberikan materi bimbingan. Hal ini bertujuan agar materi yang disampaikan tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kondisi di lapangan. Kemudian proses monitoring juga dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan harapan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Melalui kunjungan lapangan, tim memantau pelaksanaan program dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hasil dari monitoring menunjukkan bahwa program pendampingan berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat terdampak. Feedback positif dari masyarakat dan kelompok pendamping memperkuat bukti keberhasilan pendekatan yang diambil oleh tim dalam memberikan pendampingan sosial kepada masyarakat terdampak.

Dengan mengintegrasikan siklus PAR ke dalam metode pendampingan masyarakat, pendekatan ini memungkinkan adanya pemantauan yang berkelanjutan, evaluasi terus-menerus, dan penyesuaian rencana aksi sesuai dengan perkembangan yang mungkin terjadi selama proses pendampingan. Ini juga memastikan bahwa solusi yang diberikan oleh tim penelitian dan BNPB tetap relevan dan

efektif dalam mengatasi dampak erupsi Gunung Semeru, serta memungkinkan pemulihan yang berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam aspek keagamaan, penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan Rukun Kematian di setiap fasilitas sosial (Fasos) menjadi prioritas utama. Hal ini menggarisbawahi pentingnya keberagaman sebagai pondasi utama bagi masyarakat terdampak. Sehingga, untuk memastikan bahwa kebutuhan ini terpenuhi, Program Pendampingan Sosial telah mengalokasikan sumber daya untuk pengadaan kebutuhan tersebut dengan bekerja sama dengan BNPB. Selanjutnya, pengabdian ini meninjau kebutuhan khusus setiap fasos. Melalui survei yang telah dilakukan, ditemukan bahwa setiap Fasos memiliki kebutuhan khusus. Beberapa Fasos belum memiliki perlengkapan pemulasaran jenazah, sementara yang lain membutuhkan pengeras suara, tikar, dan lainnya. Oleh karena itu, pengabdian berusaha memberikan pendampingan secara tepat berdasarkan kebutuhan setiap fasos. Terakhir, adalah bimbingan teknis terkait rukun kematian telah dilakukan. Dalam proses pendampingan, praktisi terkait diundang untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai tata cara pemakaman sesuai syariat dan kepercayaan setempat.

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, pendampingan sosial melalui pendekatan religi bagi masyarakat terdampak letusan Gunung Semeru memang telah menunjukkan dampak positif, namun keberlanjutan dari pendampingan ini menjadi esensial. Masyarakat terdampak tentu memerlukan waktu yang lebih lama untuk pemulihan sepenuhnya, baik dari aspek fisik maupun psikososial. Oleh karena itu, sangat disarankan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang dan BNPB agar pendampingan ini tidak hanya berhenti setelah

satu periode, melainkan harus berkelanjutan dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Keberlanjutan pendampingan akan memastikan bahwa masyarakat terus mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan dan memulihkan kehidupan mereka pasca-bencana.

Referensi

1. Purba, A., Sumantri, S. H., Kurniadi, A., & Putra, D. R. K. (2022). Analisis kapasitas masyarakat terdampak erupsi gunung semeru. *PENDIPA Journal of Science Education*, 6(2), 599–608.
2. Magma Indonesia. (2021, September 20). *TIPE GUNUNG API DI INDONESIA (A, B, DAN C)*. <https://magma.esdm.go.id/v1/edukasi/tipe-gunung-api-di-indonesia-a-b-dan-c>
3. BNPB. (2021, December 7). *Warga Mengungsi Akibat Letusan Gunung Semeru Sebanyak 3.697 Jiwa*. <https://bnpb.go.id/berita/-update-warga-mengungsi-akibat-letusan-gunung-semeru-sebanyak-3-697-jiwa>
4. Hafni, R., & Lubis, L. S. (2016). Dampak erupsi gunung sinabung terhadap kondisi Sosial ekonom petani di desa suka meriah Kecamatan payung kabupaten karo. *Jurnal Ekonomikawan*, 16(1), 77828.
5. Sulistiyowati, Y., Indah, S., Ekasari, L. D., Mukoffi, A., Susanti, R. A. D., & Wibisono, S. H. (2022). Pendampingan dan pemulihan trauma pasca erupsi gunung semeru pada masyarakat desa curah kobokan dan supit urang kabupaten lumajang. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 105–110.
6. Bahransyaf, D. (2009). Pemberdayaan masyarakat pasca bencana berbasis penelitian. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 14(1), 47–56.
7. Zuhrah, F., Sukiati, S., Rustam, R., Siregar, P., & Batubara, C. (2016). Rekonstruksi social keagamaan korban bencana Sinabung pasca pengungsian, Desa Gung Pinto, Kec. Neman Teran Kabupaten Karo Sumatera Utara.

8. Gerungan, W. M. (2019). Penanggulangan bencana pada tahap pascabencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. *Lex et Societatis*, 7(9).
9. Zagarino, A., Pratiwi, D. C., Nurhayati, R., & Hertati, D. (2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Erupsi Gunung Semeru Di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(5), 762–773.
10. Okfitasari, A., Narulitasari, D., Ikhsan, A., & Supriyono, E. (2023). Semeru Bangkit: Motivasi Menumbuhkan Semangat dan Penyaluran Bantuan Sosial Pengungsi Semeru di Lumajang Jawa Timur (PKM Nasional Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia). *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2).
11. Khan, H., Vasilescu, L. G., & Khan, A. (2008). Disaster management cycle-a theoretical approach. *Journal of Management and Marketing*, 6(1), 43–50.
12. Amrullah, M., Affandi, G. R., & Kusumawardhana, M. D. (2022). Psikososial Berbasis Pendekatan Agama Untuk Pelajar Terdampak Bencana Erupsi Gunung Semeru Tahun 2021 di Desa Sumber Wuluh Lumajang. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3, 761–764.
13. Ekawati, J. (2018). Kebertahanan Kultural dan Religi di Area Permukiman Terdampak Bencana Lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 13(2), 122–134.
14. Sheikhi, R. A., Seyedin, H., Qanizadeh, G., & Jahangiri, K. (2021). Role of religious institutions in disaster risk management: A systematic review. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 15(2), 239–254.
15. Shannonhouse, L. R., Bialo, J. A., Majuta, A. R., Zeligman, M. R., Davis, D. E., McElroy-Heltzel, S. E., Aten, J. D., Davis, E. B., Van Tongeren, D. R., & Hook, J. N. (2019). Conserving resources during chronic disaster: Impacts of religious and meaning-focused coping on Botswana drought survivors. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 11(2), 137.
16. Thouret, J.-C., Wavelet, E., Taillandier, M., Tjahjono, B., Jenkins, S. F., Azzaoui, N., & Santoni, O. (2022). Defining population socio-economic characteristics, hazard knowledge and risk perception: The adaptive capacity to persistent volcanic threats from Semeru, Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 77, 103064.
17. Ahmad, H. A. (2015). Rukun Kematian: Kearifan Lokal dan Modal Sosial bagi Kerukunan Umat Beragama di Kota Bandar Lampung. *Harmoni*, 14(1), 53–66.
18. Darlan, S. (2023). Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah bagi Anggota Rukun Kematian Al Amanah Palangka Raya. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14(2), 246–252.
19. Lubis, R. H. (2019). Spiritualitas bencana: konteks pengetahuan lokal dalam penanggulangan bencana. *Pustaka Kaji*.
20. Septiawantari, R., & Mustikasari, M. (2021). Gambaran makna hidup pada pertumbuhan pasca trauma penyintas bencana alam. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 9(3), 539–548.
21. Widgdo, M. S. A. (2021). Kebencanaan, Islam, dan Partisipasi Masyarakat: Optimalisasi Destana Donoharjo dan Tim Kamboja Menghadapi Wabah Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*.
22. Kemmis, S., & Wilkinson, M. (2002). Participatory action research and the study of practice. In *Action research in practice* (pp. 21–36). Routledge.
23. Soehadha, M. (2016). Pemberdayaan masyarakat berbasis agama; model pengabdian masyarakat oleh dosen dan peran pusat pengabdian kepada masyarakat uin Sunan kalijaga. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 12(1), 1–16.
24. Afandi, A. (2020). Participatory Action Research (PAR) Metodologi Alternatif Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif. In *Workshop Pengabdian Berbasis Riset Di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (Vol. 53, No. 9, pp. 1689–1699).